

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bergérah dalam bidang dakwah dan sosial keagamaan, dapat dilihat didalam konteks merespon, tantangan yang ada didalamnya. Hal ini karena Muhammadiyah lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan realitas sosial serta persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, karena itulah Muhammadiyah ada untuk mengurangi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat dan memperbaiki kondisi bangsa melalui jalur agama dan dakwah.

Komitmen Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wujudkan secara tegas, Muhammadiyah terlepas dari bidang politik. Hal ini tidak berarti Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiyah pasti akan terlibat atau turut bermain dalam kancah politik nasional baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>1</sup>

Politik adalah salah suatu persoalan yang hampir pasti menciptakan sikap pro dan kontra serta mempengaruhi kondisi internal Muhammadiyah dalam perkembangannya. Wacana tentang perlu atau tidaknya Muhammadiyah untuk

---

<sup>1</sup> Deliar Noer, Muhammadiyah Beberapa Saran, Dalam Nurhadi M. Musawir, *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah*, Lembaga Pustaka Dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 1996, Hal 39.

terjun dibidang politik praktis selalu menjadi agenda yang hangat dibicarakan dan di diskusikan. Kenyataan ini terjadi setelah melihat banyaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah berpartisipasi secara aktif didalam pemerintahan dan partai politik di Indonesia. Model hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah banyak dipengaruhi oleh sikap Muhammadiyah terhadap pola yang sedang berkembang.

Persinggungan hubungan Muhammadiyah dengan politik secara signifikan adalah ketika Muhammadiyah menjadi pendukung utama berdirinya masyumi sebagai partai politik Islam. Masyumi saat itu diharapkan menjadi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia yang mengkhususkan perjuangannya dibidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam di Indonesia. Namun sayangnya banyak partai politik Islam lainnya yang ikut dalam politik yang menyebabkan suara umat terpecah.

Pada masa orde baru keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis terlihat dengan berdirinya Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Namun karena adanya perpecahan yang menyebabkan terjadinya kudeta yang dilakukan warga yang tidak mendukung terhadap kepemimpinan Parmusi, Muhammadiyah kembali memutuskan aktifitas politiknya dalam mendukung Parmusi yang mengakibatkan Muhammadiyah keluar dari kepengurusan Parmusi pada tahun 1970. Kegagalan politik untuk yang kedua kalinya tersebut mendorong Muhammadiyah untuk tidak lagi terlibat secara aktif dalam politik praktis seperti

tahun 1971 yang memutuskan Muhammadiyah untuk kembali menjadi organisasi yang netral dan tidak mendukung partai manapun dalam pergolakan politik di Indonesia pada masa mendatang.

Menaiki periode kepemimpinan Muhammadiyah paska Muktamar-42 tahun 1990 di Yogyakarta, Muhammadiyah menunjukkan perubahan-perubahan dalam penerapan sikap politik yang sangat berbeda dengan kepemimpinan periode-periode sebelumnya, sehingga Muhammadiyah paska Muktamar-42 semakin menunjukkan gejala yang lebih dinamis, proaktif dan sedikit vokal dalam perkembangan politik nasional.

Selain itu secara langsung atau tidak langsung kondisi makin membaiknya hubungan pemerintah yang sedang berkuasa dengan Islam dan Muhammadiyah sejak awal tahun 1990-an juga membawa manfaat yang sangat besar bagi perkembangan pola pikir warga Muhammadiyah pada umumnya. Perubahan sifat hubungan pemerintah dengan Islam yang menuju kearah hubungan yang komoditif, ditandai dengan semakin responsifnya pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan umat Islam, serta memberikan kesempatan kepada organisasi yang berideologi Islam untuk lebih berkembang.

Setelah terpilihnya Amien Rais menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1995-2000, Muhammadiyah mengalami transformasi organisasi secara besar-besaran. Muhammadiyah jauh lebih kritis dan vokal dalam melihat perkembangan serta fenomena yang terjadi dimasyarakat

Muhammadiyah selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan kondisi masyarakat.

Pemilu 2004 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana ada perbedaan yang mendasar, yaitu sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat tanpa harus diwakili oleh anggota dewan seperti yang terjadi selama ini. Pemilihan langsung ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah, tahap pertama pada tanggal 5 April 2004 pemilihan partai dan anggota DPR, DPRD dan DPD, tahap kedua pada tanggal 5 Juli 2004 yaitu pemilihan presiden putaran pertama dan tahap ketiga pada tanggal 20 September 2004 pemilihan presiden putaran kedua.

Memasuki pemilihan presiden putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dimana ada lima pasang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang lolos untuk mengikuti pemilihan presiden secara langsung. Wiranto dan Salahudin wahid merupakan pasangan yang berasal dari hasil konvensi partrai Golkar, Megawati dan Hasyim Muzadi dari PDIP, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dari PAN, dan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla dari Partai Demokrat serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar dari PPP. Melihat perkembangan yang ada sebenarnya warga Muhammadiyah mayoritas lebih mendukung pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dari pada pasangan lainnya.

Namun guna menguatkan serta memperjelas dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais, DPP Muhammadiyah membuat suatu keputusan resmi dukungannya kepada Amien Rais. Dukungan itu menurut banyak kalangan cukup kontroversial dan berisiko terhadap keberadaan dan eksistensi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengingat konflik yang akan terjadi nantinya.

Sebelumnya, pada sidang pleno di Yogyakarta pada 9-10 Februari 2004, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan pernyataan yang senada. Menurut mereka, dalam hal ini suara PAN adalah modal pertama, sedangkan Muhammadiyah adalah modal utama. Maka, dengan modal utama itu warga Muhammadiyah yang aktif di parpol lain beserta para elemen reformis lainnya, diharapkan memberikan suara pada Amien Rais pada pemilihan presiden putaran I dan II.<sup>2</sup>

Namun, dukungan resmi Muhammadiyah terhadap Amien Rais, haruslah diberi catatan yang penting. Adalah fakta bahwa warga Muhammadiyah berfikir rasional, modern, dan plural. Polemik fatwa resmi Muhammadiyah untuk mendukung Amien Rais, tentu harus diingat kembali. Dukungan itu terbukti banyak menimbulkan konflik di internal organisasi Muhammadiyah. Hal itu misalnya terlihat pada protes dari warga dan pengurus Muhammadiyah yang juga banyak aktif di partai lainnya seperti PKS, PPP, Golkar, atau PBR yang merasa di anak tirikan secara politik setelah lahirnya keputusan resmi dari DPP

---

<sup>2</sup> Kompas, 24 Mei 2004.

Muhammadiyah untuk mendukung salah satu calon presiden. Gugatan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang menganggap bahwa dukungan resmi itu sebagai bentuk pelanggaran *khittah* dan runtuhnya peran Muhammadiyah sebagai tenda bangsa, yang selama ini selalu bersikap netral terhadap pemerintah yang berkuasa.

Dalam pemilihan presiden putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 ternyata dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais tidak membawa ketua umum PAN ini lolos ke pemilihan presiden putaran kedua. Perolehan suara Amien Rais hanya berkisar pada angka 15 % yang menempatkannya pada posisi ke-4 dibawah capres Susilo Bambang Yudoyono, Megawati dan Wiranto.

Dalam menghadapi pemilihan presiden putaran kedua tanggal 20 September 2004, Muhammadiyah kembali bersikap netral dan berusaha menjaga jarak dengan kedua calon presiden yang lolos masuk putaran kedua, namun bukan berarti Muhammadiyah tidak mendukung pemerintahan yang akan terbentuk nantinya. Menurut banyak kalangan sikap Muhammadiyah ini di karenakan calon presiden yang didukungnya tidak lolos dalam pemilu presiden putaran kedua. Sehingga untuk mendukung calon presiden yang bukan berasal dari golongan Muhammadiyah sangat kecil kemungkinannya, maka DPP Muhammadiyah menyerahkan keputusan untuk memilih kepada hati nurani warganya.

Numun secara personala dari tokoh dan warga Muhammadiyah dapat terlihat ada dua kecendrungan yaitu golput dan kecendrungan untuk memilih Susilo Bambang Yudoyono dalam pemilu presiden putaran kedua

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, terlihat bahwa mulai tahun 1990-an terjadi tranformasi kekuatan politik Muhammadiyah terhadap perkembangan Negara Indonesia. Melihat situasi saat ini, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu **“Bagaimana sikap politik dan strategi Muhammadiyah dalam pemilihan umum presiden putaran I dan II ?”**.

## C. Kerangka Dasar Teori

### 1. Politik

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judging wisely, well-judget prudent*.<sup>3</sup> Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (greek) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*, kata itu juga berasal dari kata polis yang searti dengan city: kota. *Politic* kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia dengan 3 arti, yaitu:

“ Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik”.

Dari sekian banyak definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecendrungan pendefinisian politik, *pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintah pusat atau

<sup>3</sup> *Encyclopedia of Indonesian Language*

<sup>4</sup> *Politik dan Pemerintahan*, Al-Chanabi dan Ibnu Taimiah, Pt. Rine

pemerintahan daerah. *Kedua* pandangan yang mengaitkan dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik.<sup>4</sup> Perbedaan pendekatan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan; yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku.

Pendekatan tradisional meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pendekatan historis yang menekankan pada perkembangan partai politik dan ide-ide politik yang besar.
- b. Pendekatan legislatif yang menekankan pada konstitusi dan perundang-undangan sebuah negara
- c. Pendekatan institusional yang menekankan pada masalah-masalah institusi politik seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sedangkan pendekatan perilaku lebih menekankan perhatiannya pada aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting dalam politik, tetapi ia bukanlah hakikat politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat disekitar institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik.

Sedangkan menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud mempertahankan dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk

## 2. Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 08 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, Bab I Pasal I disebutkan bahwa :

“..... yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ikut berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup>

Pemberitukan Ormas adalah salah satu perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga Negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut didalam peran serta pembangunan nasional.

Dalam pengertian sehari-hari, konsep tentang organisasi kemasyarakatan seringkali dibedakan dengan organisasi politik. Ormas adalah kelompok kepentingan (interest group), sedangkan organisasi politik adalah partai politik (politics party).

---

<sup>5</sup> “... dan ...” (T.M. ...). UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat, Jakarta, 2000, Hal 170

Jika dikaitkan hubungannya dengan pemilu dan parlemen (DPR) memang benar ormas tidak memiliki akses langsung dalam pembentukan pola perwakilan politik secara nasional, sedangkan partai politik merupakan lembaga yang paling sah sebagai saluran komunikasi politik. Tetapi dalam pendekatan *power politics* organisasi kemasyarakatan adalah sama pentingnya seperti partai politik. Konsep *power politics* menilai kepiawayan organisasi baik organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik dari efektifitas mobilisasi massa, dari legitimasi aktual terhadap opini publik. *Power politics* menilai orang atau kelompok orang berdasarkan kepentingan, sekaligus kekuatan politiknya.

Karena organisasi dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, maka organisasi kemasyarakatan dinilai sama peran politiknya dengan organisasi politik.

Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak akan pernah menjadi partai politik. Meskipun demikian, dengan keyakinannya bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di bumi ini maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang yang harus diperhatikan, tak terkecuali soal-soal kenegaraan.

Penjelasan mengenai perjuangan Muhammadiyah juga dapat terlihat dalam *Khittah Perjuangan Muhammadiyah* yang diputuskan dalam *Muktamar Muhammadiyah ke 44* yang berlangsung di Jakarta pada tahun

2000 telah mengambil beberapa keputusan penting, termasuk dalam hal-hal politik<sup>6</sup>, yaitu:

- a. Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-44 telah menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tidak bergerak dalam politik praktis (*riyel politics*), seperti partai politik, tetapi dapat mengembangkan fungsi sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) yang efektif melalui berbagai saluran, misalnya untuk memainkan peranan politik secara aktif dan strategis sesuai dengan prinsip da'wah Islam amar makruf nahi munkar dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara, sehingga tidak menarik diri dan cenderung alergi terhadap politik yang pada akhirnya proses dan sistem kehidupan politik ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang dimungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan umat dan kemaslahatan umat.
- b. Melaksanakan kajian-kajian yang intensif dan sistematis mengenai politik dan masalah-masalah yang aktual dan strategis sebagai masukan dan mengantisipasi dan pengambilan sikap/kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara.
- c. Menyusun konsep etika politik muslim sebagai bahan pedoman bagi para politisi muslim, khususnya politisi Muhammadiyah.

---

<sup>6</sup> Musthafa Kamal Pasha, Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam*

- d. Melaksanakan pendidikan politik yang intensif dan simpatik untuk meningkatkan kesadaran politik dikalangan warga Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang dilaksanakan bekerja sama antara Lembaga Hikmah dan Kemasyarakatan dan Majelis/Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah.
- e. Memasyarakatkan pendidikan demokrasi untuk membentuk budaya politik demokratik dikalangan elit dan massa sebagai bagian reformasi yang mengarah pada demokratisasi yang tersistem dan berperadaban.
- f. Mendirikan lembaga advokasi, serta melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan kekerasan politik.
- g. Meningkatkan dan memanfaatkan media massa, baik cetak maupun elektronik sebagai media komunikasi politik yang terbuka dalam mengartikulasikan aspirasi politik Muhammadiyah, umat Islam dan masyarakat luas yang mengarah pada penciptaan kondisi politik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemaslahatan hajat hidup publik.
- h. Melakukan usaha-usaha yang berarti untuk terciptanya kesatuan politik umat Islam dalam kerangka Ukhuwah Islamiah dan terbentuknya kekuatan nasional Islam politik.
- i. Menyelenggarakan forum ukhuwah dan silaturrahim yang efektif untuk menghimpun kekuatan politik Muhammadiyah dalam mengemban misi kemasyarakatan dikalangan politik.

- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya Masyarakat Madani (civil society) sebagai basis yang kokoh menuju Indonesia Baru yang berkedaulatan rakyat dan terjadinya reposisi dan penyeimbangan baru dalam hubungan rakyat dan negara.

### 3. Muhammadiyah dan Politik

#### a. Politik Muhammadiyah

Perilaku politik Muhammadiyah adalah politik yang dilakukan oleh warga yang dikategorikan politik kelompok dari organisasi Muhammadiyah dalam proses politik.<sup>7</sup>

Asumsi dasar yang dikembangkan sebagai bangunan konsep dan teori tentang perilaku Muhammadiyah ialah kecenderungan sikap moderat, akomodatif yang selama ini melekat dan menjadi corak yang khas dari gerakan Muhammadiyah, yaitu perilaku politik kooperatif dan senantiasa ingin menjaga jarak dalam semangat netralitas dalam watak gerakan kultural Muhammadiyah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000, Hal 49.

<sup>8</sup> Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang moderat, moderat, dan akomodatif dalam berisikan

Orientasi perilaku politik Muhammadiyah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

### 1. Idealis

Sikap politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal terhadap kekuasaan. Istilah idealis merujuk pada pandangan kelompok sejak Masyumi di bubarkan tetap berkeinginan mengembangkan tatanan politik Islam sendiri dikalangan umat Islam.

### 2. Akomodatif

Sikap politik yang kompromi atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah dan negara) tetapi tidak dengan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas pada kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap berpegang pada prinsip gerakan Muhammadiyah.

### 3. Pragmatis

Sikap politik yang mengintegrasikan diri dalam kekuasaan dan masuk dalam struktur kekuasaan itu dengan kecenderungan meninggalkan label ideologis Muhammadiyah. Pragmatis merupakan perilaku yang lebih memanfaatkan Muhammadiyah dari pada memperjuangkan Muhammadiyah dalam percaturan politik, kendati

... dan berpegang pada prinsip tersebut

b. Muhammadiyah dalam pemilu 2004

Dalam pelaksanaan pemilu 2004 Muhammadiyah sebagai salah satu persyarikatan Islam atau organisasi masyarakat yang berbasis agama terbesar di Indonesia telah mengeluarkan keputusan untuk berpartisipasi secara aktif guna menyukseskan pemilu 2004 agar mendapatkan wakil-wakil rakyat yang diharapkan dapat membawa perubahan dan memberikan perkembangan yang positif terhadap Indonesia. Muhammadiyah memandang pemilu 2004 sebagai suatu proses politik yang demokratis bagi bangsa sebagai bentuk dari gerakan reformasi yang telah disepakati pada tahun 1998.

Dengan sistem yang baru dalam pelaksanaan pemilu, yaitu melalui 3 tahapan dimana pemilihan dilakukan tidak hanya untuk memilih lambang partai tertentu saja tetapi telah memberikan kesempatan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk menjadi anggota legislatif serta wakil-wakil yang ada didalam lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perkembangan Indonesia.

c. Respon Muhammadiyah dalam pemilihan presiden

Muhammadiyah memandang pemilihan presiden secara langsung merupakan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk bisa menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin bangsa yang mana selama ini

presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga rakyat tidak dapat menentukan presiden sesuai dengan harapan rakyat tetapi merupakan presiden dari hasil lobi-lobi politik dari partai dan elit-elit politik tertentu. Dimana lobi-lobi politik itu pada akhirnya akan mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu untuk dapat memegang kekuasaan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan banyak keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah tidak memihak rakyat.

#### 4. Pemilihan Umum

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan.<sup>9</sup> Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya guna menduduki jabatan tertentu.

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep”.<sup>10</sup>

Pendapat di atas pada intinya adalah bahwa pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat

<sup>9</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 81.

<sup>10</sup> Harris G. Warren, *Dalam Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty

pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat suatu keputusan.

Sedangkan dalam Undang-Undang pemilu, DPR, DPRD, dan DPD tahun 2003<sup>11</sup>, yaitu:

Pasal 2 : Pemilu dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3 : Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4 : Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang di liburkan.

Pasal 5 : (1) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD dan propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.

(2) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perorangan.

Pasal 6 : (1) Pemilu memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1999 BAB I Ketentuan Umum disebutkan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>12</sup>

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang di bentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, di jalankan sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>13</sup> Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>14</sup>

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan suatu pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang di bentuk melalui mekanisme pemilihan umum adalah yang berasal dari rakyat, di jalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan di abdikan untuk kesejahteraan rakyat. Harris G Warren dan kawan-kawan mengemukakan batasan mengenai pemilu. Menurut mereka pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk di kerjakan pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dapat dimiliki.<sup>15</sup> Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara

---

<sup>12</sup> UU No 3 Tahun 1999, Tentang Pemilihan Umum, Tamita Utama, Jakarta, 1999, Hal 25.

<sup>13</sup> Penjelasan. Ibid. Hal 61

<sup>14</sup> A Suduharto Djiwandono dalam Haryanto, *Partai politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal 81.

<sup>15</sup> Moh. Kurnandi dan Hermaili Ibrahim, dalam Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang*

mempunyai hak untuk memilih dengan bebas, maka berarti rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung.

Pemilu merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pula bahwa pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan yaitu dengan jalan memilih wakil-wakil yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.<sup>16</sup>

Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.<sup>17</sup>

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.<sup>18</sup>

Namun pada pemilihan umum tahun 2004 memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari pemilu-pemilu sebelumnya, dimana rakyat dapat memilih secara langsung orang-orang yang akan menduduki jabatan di pemerintahan. Pemilihan umum kali ini tidak lagi menggunakan sistem distrik yang calon-calon pemimpin dipilih oleh anggota MPR dan DPR, pemilihan

---

<sup>16</sup> Haryanto. Op. Cit. Hal 84.

<sup>17</sup> Moh Kunardi Dan Harmaily Ibrahim, dalam Mashudi, *pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju Bandung, 1993. Hal 2.

<sup>18</sup> Tim Peneliti Sistem Pemilihan Umum, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Sebuah laporan Penelitian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, Hal 2.

umum kali ini merupakan pertarungan partai pendukung dan juga simpatisan dari tokoh yang dicalonkan, jadi selain partai politik popularitas seorang calon juga sangat penting. Pada pemilu ini juga dilaksanakan dalam tiga tahapan, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya dilaksanakan dalam satu tahapan. Pemilu kali ini pada tahap pertama merupakan pemilihan partai sekaligus calon legislatif yang didukung baik DPR, maupun DPRD serta pemilihan DPD yang baru pertama kali ada di Indonesia. Pada tahap kedua merupakan pemilihan presiden putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, diikuti oleh 5 orang kandidat yang akan bersaing. Tahap ketiga merupakan pemilihan presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 yang diwakili oleh dua kandidat calon presiden dan wakil presiden yang berada pada posisi pertama dan kedua pada pemilihan presiden putaran pertama.

Pemilu kali ini juga memperlihatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam menentukan pemimpin-pemimpin secara demokratis dan juga menguatkan posisi presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pemilu kali ini juga memperlihatkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam menentukan pemimpin-pemimpin secara demokratis dan juga menguatkan posisi presiden

Sementara itu mengacu pada tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum pasca Orde Baru (era reformasi) dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, ditetapkan asas pemilu sebagai berikut :

a. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan partai politik, peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik, peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Langsung

Rakyat pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

d. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang berusia 21 tahun berhak

... ..

presiden dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu pemilihan presiden putaran I serta pemilihan presiden putaran II secara langsung.

### **E. Definisi Operasional**

Sikap politik Muhammadiyah terhadap capres pada pemilihan umum tahun 2004 terutama dalam pemilihan presiden secara langsung putaran I dan

II. Sikap politik Muhammadiyah terhadap calon presiden dan wakil presiden

1. Kebijakan-kebijakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta pada pemilu presiden putaran I
2. Strategi internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Strategi eksternal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Sikap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas kekalahan Amien Rais
5. Sikap pengurus warga Muhammadiyah dalam pemilu presiden putaran II
6. Hasil penghitungan suara pemilu presiden putaran II di Yogyakarta dan nasional

### **H. Metode Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

1.1.1. Tujuan Penelitian: Ditinjau dari penelitian Muhammadiyah dalam

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa ada diskriminasi berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

e. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapapun. Dalam melaksanakan hak-haknya, setiap warga negara keamanannya dijamin sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

f. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat di ketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilik suara dan secara suka rela bersedia, mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

#### **D. Definisi Konseptual**

##### **1. Sikap Politik**

Sikap politik merupakan implementasi dari kepentingan orang-orang atau organisasi dalam menentukan pilihannya. Dalam pemilihan presiden putaran pertama, Muhammadiyah secara resmi telah mengambil sikap politik yang secara langsung masuk dalam lingkungan politik praktis dengan mendukung Amien Rais untuk maju menjadi calon presiden dalam pemilihan umum presiden putaran pertama.

##### **2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah No M.07/W/66 pada tanggal 20 Muharram 1386 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 1966 berkedudukan di Yogyakarta yang bertujuan untuk mengajak serta mengajarkan Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad S A W. Dengan berpegang teguh pada prinsip yang disepakati yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

##### **3. Pemilu Presiden**

Pemilihan umum presiden merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan memilih orang-orang yang akan duduk dipemerintahan. Khususnya pada Pemilihan umum 2004 merupakan pemilu yang bersejarah dan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi hubungan antara Muhammadiyah dengan politik yang konfrontatif menjadi akomodatif.
- c. untuk menyumbangkan studi-studi mengenai Muhammadiyah yang nantinya dapat melengkapi studi Muhammadiyah dalam wacana politik di Indonesia.

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian mengenai analisis sikap politik Muhammadiyah dalam pemilihan presiden putaran I dan putaran II di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kasus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat memberikan, manfaat antara lain :

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan dari teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah, terutama mengenai studi ilmu politik.

b. Dari sisi keilmuan di harapkan dapat memperkaya literatur yang mengkaji Muhammadiyah dari sudut pandang keikutsertaan Muhammadiyah kedalam kancah perpolitikan Indonesia.

c. Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengurus Muhammadiyah dalam menjalankan organisasi di masa mendatang serta sebagai koreksi terhadap apa yang terjadi selama ini.

### 3. Jenis Penelitian

Berdasarkan pertimbangan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang diperlukan, persepsi tentang realitas dan ketersediaan bahan serta didasarkan pula pada prinsip-prinsip teoritis dan metodologis maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor.<sup>19</sup> Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Studi ini akan menggunakan perpaduan dua metode yaitu metode historis dan metode deskriptif.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis sengaja mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis sikap politik Muhammadiyah terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden putaran I dan II dengan studi kasus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Maka penulis akan

memfokuskan sikap politik Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah pusat perkembangan Muhammadiyah di Indonesia.

#### 5. Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini yakni sikap politik Muhammadiyah dalam Pemilihan presiden putaran pertama dan putaran kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, maka yang menjadi unit analisis data adalah para pengurus Muhammadiyah dan orang atau lembaga yang berkaitan dan berkepentingan baik secara langsung dan tidak langsung dengan Muhammadiyah.

Sedangkan level of analisis pada penelitian adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai pendukung data dari Suara Muhammadiyah Yogyakarta.

#### 6. Sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan mengenai tujuan penelitian.<sup>20</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang tersusun dalam dokumen-dokumen (tapi tidak langsung) melalui buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, Hal 221.

yang diteliti.<sup>21</sup> Sedangkan data primer yaitu data yang umumnya terdapat dalam laporan-laporan muktamar Muhammadiyah, peraturan-peraturan, perundang-undangan, sumbangan-sumbangan dari Muhammadiyah, siaran pers, majalah. Surat kabar, jurnal, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari arsip-arsip atau catatan-catatan yang terdapat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan Suara Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pendukung. Menurut Winarno Surachmad, dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa tersebut.

### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data sekaligus diselidiki atau bisa dikatakan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan data yang

---

<sup>21</sup> Winarno Surachmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Grafindo, 1995, Hal 84

dibutuhkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan argumentasi.

### c. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara itu juga memerlukan pola yang fleksibel, dan mereka benar-benar memahami permasalahan dan mendalami situasi dan informasi, sebab yang menjadi responden sebagian besar adalah tokoh-tokoh organisasi.<sup>22</sup>

## 8. Teknis Analisis Data

Prof. Dr. Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>23</sup>

Analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasi, dan jumlahnya sedikit. Penelitian kualitatif lebih menekankan hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanan bukan pada

---

<sup>22</sup> Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta, 1999, Hal 49.

hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentasi.